



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
**UNIT KERJA** : PT TULANG BAWANG JAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TAMAMI AKIP
2. Jabatan : KOMISARIS
3. NHK : 50632

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **5.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 490 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 472 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **229.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA V A/T DSL / MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA D1BO2N26L2/VT / SPD MTR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000



3. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI

Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 136.228.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 45.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 55.000.000

Sub Total

Rp. 5.765.728.000

III. HUTANG

Rp. 202.437.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.563.290.600

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.